

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dulaisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Isharyanto, J.E dan Bagus. 2010. *Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan. Yogyakarta.
- Kusdarini, Eny. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. UNY Press. Yogyakarta.
- Meleong, J Lexy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ridwan, H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo. Jakarta.
- Sinabela, L.P. dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sirajuddin. dkk. 2011. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Setara Press. Malang.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar
Grafika Offset. Jakarta.

Hadi, Syamsi, 2014, *Menjadi PATEN Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan*, E-media Solusindo, Semarang

Moenir, H.A.S, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Cetakan
Keenam, Bumi Aksara, Jakarta

Versteden, C.J.N, 1984, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D, Tjeenk
Willink, Alphen aan den Rijn

Perundangan-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/014799 tanggal 29 September 2015 Perihal Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di kabupaten Boyolali.

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016

Surat Keputusan

Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor 137/350 Tahun 2015 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai *Pilot project* Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Boyolali.

Peraturan Camat Karanggede Nomor 137/46 Tahun 2015 tentang Susunan Keanggotaan Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

Surat Keputusan Camat Ampel Nomor 041.7/013/43/2016 tentang Susunan Keanggotaan Tim Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali

Keputusan Camat Nomor 016 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali

Keputusan Camat Nogosari Nomor 017 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali

Makalah

Basah, Sjachran. *“Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan”*.
Seminar Hukum Lingkungan oleh KLH bekerja sama dengan *Legal Mandate
Compliance end Eforcement* dari BAPEDAL. Jakarta. 2-3 Mei 1996.

Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2015.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.web.id, diakses tanggal 21 Oktober 2016.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Daftar Tabel Kependudukan,
[https://boyolalikab.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-
daftar-subjek1](https://boyolalikab.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1) , diakses tanggal 25 Oktober 2016.

Kualitas Pelayanan Publik Dianggap Masih Rendah,
[http://www.ti.or.id/index.php/news/2016/01/04/2015-kualitas-pelayanan-
publik-dianggap-masih-rendah](http://www.ti.or.id/index.php/news/2016/01/04/2015-kualitas-pelayanan-publik-dianggap-masih-rendah), diakses pada tanggal 17 Desember 2016

Wilujeng Kharisma, Ini 7 Pelayanan Publik Paling Rawan Pungli (pidato
Pelaksanaan tugas Inspektur Jenderal kementran Dalam Negeri Sri
Wahyuningsih), [http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/17/ini-7-
pelayanan-publik-paling-rawan-pungli-385059](http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/17/ini-7-pelayanan-publik-paling-rawan-pungli-385059), diakses pada tanggal 17
Desember 2016.

Ratna Ajeng Tejomukti, Pelayanan Publik di kecamatan Gunung Putri Buruk,

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek->

[nasional/15/12/28/o02l1s282-pelayanan-publik-di-kecamatan-gunung-putri-buruk,](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/12/28/o02l1s282-pelayanan-publik-di-kecamatan-gunung-putri-buruk)

diakses pada 17 Desember 2016